

## Kajian Fenomena Pandemi Covid-19 di Indonesia: Perspektif Wacana, Pengetahuan dan Kekuasaan Foucault

**Eki Karsani Apriliyadi**

Peneliti Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Iptek dan Inovasi (PPKMI), Lembaga  
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)  
Email: eki.karsani@gmail.com, ekik001@lipi.go.id

**Tommy Hendrix**

Peneliti Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Iptek dan Inovasi (PPKMI), Lembaga  
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)  
Email: tomm001@lipi.go.id

### Abstrak

*Studi ini bertujuan menganalisis pandemi Covid-19 sebagai fenomena sosial yang memberikan ruang interpretasi dari masyarakat dalam berbagai ruang aksi di Indonesia. Artikel ini merupakan kajian atas fenomena pandemi Covid-19 yang dianalisis secara kualitatif menggunakan perspektif wacana, pengetahuan dan kekuasaan dari Michel Foucault. Hasilnya menunjukkan bahwa berbagai interpretasi dari masyarakat atas protokol kesehatan dan pandemi Covid 19, melibatkan tindakan nyata yang berkaitan dengan pemahaman tentang kekuasaan yang subjektif, horisontal, serta hadir dalam ruang interaksi publik yang melibatkan berbagai pihak. Perspektif Foucault melihat bahwa kekuasaan bekerja melalui beragam mekanisme dalam ruang interaksi yang dilihat secara horizontal atas pandemi Covid 19. Ruang tafsir relasi kekuasaan terkait fenomena pandemi Covid-19 di Indonesia memperlihatkan adanya tiga perhatian yang berbeda yaitu relasi kekuasaan sebagai strategi, relasi kekuasaan governmentality, dan relasi kekuasaan dominasi.*

**Kata kunci:** Pandemi Covid-19, wacana, pengetahuan, kekuasaan, pendisiplinan

### 1. Pendahuluan

Dunia digemparkan oleh virus Corona varian SARS-Cov-2 (Covid-19) di penghujung akhir tahun 2019. Virus ini pertama kali muncul dari negeri Tiongkok tepatnya di kota Wuhan Provinsi Hubei Republik Rakyat Tiongkok. Virus ini menyebar ke negara-negara lain seiring dengan intensitas mobilitas manusia secara global. Perubahan status endemi menjadi pandemi ditandai oleh makin tingginya angka penyebaran virus ini di berbagai negara. Saat artikel ini ditulis, Amerika Serikat menjadi negara yang memiliki kasus Covid-19 paling tinggi di dunia. Sementara Indonesia menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki angka kasus paling tinggi (Hidayat, 2020).

Kehadiran Covid-19 mengejutkan masyarakat umum, dunia medis dan pemerintah negara-negara dunia. Informasi mengenai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 bermuara pada protokol medis yang dikeluarkan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) mengingat

Covid-19 telah ditetapkan sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020 (Djalante, dkk, 2020). Sebelumnya pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan Covid-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) dan pada tanggal 12 Februari 2020, WHO secara resmi menetapkan penyakit yang disebabkan oleh virus corona pada manusia ini dengan sebutan *Coronavirus Disease* (Covid-19) (Safrizal, dkk, 2020).

Kini dunia sains yang berkaitan langsung dengan virus Corona berupaya keras untuk menemukan cara melawan penyebarannya, baik pembuatan vaksin maupun riset yang berhubungan dengan bahan-bahan kimia untuk menahan laju penyebaran Covid-19. Setiap negara yang terpapar Covid-19 mau tidak mau harus mengikuti langkah-langkah pencegahan berbasis protokol medis berskala global. Pandemi Covid-19 memaksa negara mengambil beragam kebijakan yang dianggap efektif bisa menahan laju penyebaran. Berbagai negara telah menutup pintu aliran manusia dari negara-negara lain terutama yang ditetapkan sebagai negara berstatus zona merah. Beberapa negara telah menetapkan kebijakan *lockdown* dengan memaksa warga negara agar tetap tinggal di dalam rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar.

Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak memberlakukan *lockdown*, namun kebijakan yang diambil adalah pembatasan interaksi sosial fisik dalam skala besar yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama tahun 2020. Pada awal pandemi Covid-19 pemerintah Indonesia, melalui Menteri Kesehatan, bersikap kurang responsif. Pandemi Covid-19 dipandang sebagai peluang meraup keuntungan ekonomi dengan membuka pariwisata bagi para wisatawan mancanegara. Keadaan menjadi terbalik ketika Presiden Jokowi mengumumkan bahwa terdapat warga Indonesia yang terkena Covid-19. Kasus pertama Covid-19 menjadi titik tolak penting bagi pemerintah menyusun berbagai kebijakan untuk menghambat laju penularan Covid-19. Beberapa ahli telah memberikan gambaran dampak dari berlakunya kebijakan karantina wilayah, yaitu lumpuhnya roda perekonomian masyarakat. Banyak warga masyarakat yang kehilangan aktivitas ekonomi dan sumber pekerjaan, terlebih warga yang bergerak di sektor informal dengan penghasilan tidak tetap atau harian. Meski demikian satu kesepakatan bersama bahwa Covid-19 merupakan virus yang mematikan, maka seluruh individu harus mendisiplinkan diri dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan.

Informasi beserta seluruh pengetahuan yang berkaitan dengan Covid-19 mengacu pada sumber-sumber pengetahuan yang diproduksi oleh pihak yang berwenang (pemerintah) berdasarkan wacana-wacana resmi yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh WHO. Berbagai

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi langkah pendisiplinan yang saat ini bersifat persuasif. Pelaksanaan kebijakan tersebut pada praktiknya sulit untuk segera dipatuhi oleh sebagian warga masyarakat. Dampak paling signifikan yang terasa oleh sebagian masyarakat adalah terganggunya roda perekonomian masyarakat, sehingga informasi tentang bahaya Covid-19 tidak terlalu banyak diperhatikan oleh sebagian masyarakat. Ketika masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, harus melaksanakan anjuran untuk tetap ada di rumah, mereka akan kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan. Kondisi kontradiktif ini menjadi tantangan kolektif baik masyarakat dan pemerintah.

Peningkatan kasus Covid-19 mendorong pemerintah, selaku otoritas, mengatur perilaku warga masyarakat dengan tujuan tercipta kedisiplinan pada protokol kesehatan. Ketaatan, kepatuhan, dan disiplin dalam menjaga diri dianggap menjadi kunci penting mencegah penyebaran Covid-19 merebak lebih luas. Namun demikian setelah proses sosialisasi dan edukasi, masih banyak sebagian warga yang beraktivitas di luar rumah dengan berbagai kepentingan, entah itu bekerja, belanja, atau berkerumun melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Selain itu perusahaan-perusahaan masih beroperasi seperti biasa. Pada satu sisi kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan karena penularan Covid-19 menjadi lebih mudah terjadi.

Pemerintah menganggap tidak ada pilihan lain dalam pencegahan penularan Covid-19 selain setiap individu harus lebih banyak tetap berada di rumah. Berkaitan dengan upaya peningkatan kepatuhan warga masyarakat terhadap protokol kesehatan, pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB pada akhir Maret 2020. PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi virus Covid-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran makin meluas (Dewi, 2020). Masyarakat dihimbau untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan agar terhindar dari Covid-19, dan mengurangi aktivitas sosial di luar rumah bila tidak ada kepentingan tertentu yang mendesak.

Pemberlakuan PSBB juga diikuti oleh pemberian jaminan sosial (bantuan sosial) bagi warga masyarakat yang terdampak secara langsung. Bagi masyarakat kepatuhan, ketaatan dan kedisiplinan perlu diberi kompensasi melalui jaminan kenyamanan dalam menjalankan anjuran kebijakan pemerintah terkait pandemi Covid-19. Setelah pemberlakuan PSBB selesai, masyarakat Indonesia masuk ke skenario *New Normal*, yang kemudian diganti dengan istilah Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), yaitu pola hidup baru yang beradaptasi dengan pandemi Covid-19. Berbagai persiapan skenario *New Normal*, AKB, dilakukan pemerintah meski sejumlah indikator mengatakan Indonesia belum layak memasuki fase

tersebut (Margianto, 2020). Pemerintah seharusnya melihat kesiapan dari berbagai sisi baik dari kesiapan sosial, ekonomi, dan kesiapan masing-masing daerah. Dalam beberapa hal pemerintah telah menyiapkan protokol kesehatan yang mengatur protokol di tempat bekerja, aturan bagi para pekerja, sampai koordinasi antara tempat bekerja dan pemerintah daerah. Sektor industri juga sudah mendapat edaran terkait dengan kawasan industri, pekerja, dan panduan *social distancing* (Asmara, 2020).

Penulis ingin menghadirkan fenomena global pandemi Covid-19 sebagai wacana, pengetahuan, dan kekuasaan dalam perspektif Michel Foucault. Teori Foucault menelaah relasi antara wacana, pengetahuan dan kekuasaan. Teori ini banyak mempengaruhi para akademisi sehingga banyak yang kemudian membahas tentang konsep kuasa yang dihubungkan dengan berbagai hal. Teori relasi kuasa dan pengetahuan Foucault dikembangkan oleh para pakar keilmuan sosial menjadi analisis wacana.

Kajian penelitian ini disusun berdasarkan tinjauan literatur karya-karya Foucault dan hasil karya para teoretisi yang mengelaborasi pemikiran dan penelitian-penelitian yang menggunakan pendekatan Foucault. Dari upaya tersebut diperoleh cara pandang sistemik Foucault terkait kekuasaan. Begitu juga dengan kajian ini pendekatan Foucault tentang kekuasaan menjadi titik berangkat dalam melihat fenomena mewabahnya Covid-19 yang telah mendorong lahirnya berbagai kebijakan dari pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di masyarakat.

## 2. Metode Penelitian

### 2.1 Tipe Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan kajian dalam melihat realitas sosial pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Pemberitaan dan informasi tentang fenomena Covid-19 melalui media internet menjadi bahan “lapangan” yang ditampilkan sebagai data sekunder dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka. Studi pustaka adalah istilah lain dari kajian pustaka, tinjauan pustaka, kajian teoritis, landasan teori, telaah pustaka (*literature review*), dan tinjauan teoritis (Melfianora, 2019).

Meskipun merupakan sebuah penelitian, penelitian dengan studi literatur tidak harus turun ke lapangan dan bertemu dengan responden. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen. Studi ini bersifat kualitatif dan dianalisis secara deskriptif. Waktu pengambilan data dilakukan dari bulan April sampai dengan Desember tahun 2020.

## 2.2 Pengumpulan Data dan Metode Analisis

Berita atau informasi terkait fenomena pandemi Covid-19 di Indonesia yang tersebar di media internet dikumpulkan untuk dianalisis secara deskriptif menggunakan tinjauan literatur karya-karya Foucault dan hasil karya para teoritis yang mengelaborasi pemikiran dan penelitian-penelitian yang menggunakan pendekatan Foucault. Dari upaya tersebut diperoleh cara pandang sistemik Foucault terkait kekuasaan.

Pendekatan Foucault tentang kekuasaan menjadi titik berangkat dalam melihat fenomena mewabahnya Covid-19 yang telah mendorong lahirnya berbagai kebijakan dari pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di masyarakat. Pendekatan Foucault ini membaca fenomena pandemi Covid-19 dari berbagai sudut pandang pelaku yang mengalami dan berada dalam situasi penanganan wabah tersebut. Tentunya perbedaan cara pandang pelaku yang terlibat menghasilkan analisis gambaran yang berbeda berdasar pada bingkai pemikiran kekuasaan, pengetahuan, dan wacana dari Foucault. Pisau analisis pendekatan Foucault ini dalam membaca fenomena pandemi Covid-19 memperlihatkan bahwa kekuasaan, pengetahuan saling mempengaruhi satu sama lain, yang mana sifat dari kekuasaannya Foucault bersifat subjektif, lahir dalam ruang interaksi sosial yang ditafsirkan berbeda oleh setiap aktor atau pelaku yang mengalaminya bergantung di mana dia memposisikan diri dalam sistem sosialnya.

## 3. Hasil Penelitian

Semenjak kasus Covid-19 dan penetapan status sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020, pemerintah Indonesia langsung menanggapinya secara serius. Salah satu tanggapan serius tersebut adalah pembentukan satuan tugas yang langsung menangani pandemi Covid-19 (Satgas Covid-19). Berbagai wacana diproduksi berdasarkan protokol medis mulai dari pentingnya menjaga kesehatan tubuh melalui pembiasaan mencuci tangan dengan *hand sanitizer* atau sabun, mandi sehabis bepergian dari luar sampai anjuran jaga jarak fisik atau dikenal dengan istilah *social* atau *physical distancing*. Pada awalnya, himbuan tersebut bersifat persuasif berupa anjuran yang mendorong pendisiplinan tubuh melalui serangkaian tindakan kesehatan yang dianggap dapat mengurangi terpaan Covid-19. Implikasi dari himbuan tersebut melahirkan kebijakan untuk bekerja dari rumah (*Work from home*), belajar dari rumah dan beribadah di rumah.

Wacana tentang pentingnya menjaga jarak diterjemahkan dengan berbagai larangan aktivitas warga di luar rumah. Meski demikian pelaksanaan kebijakan tersebut tidak semudah membalikan telapak tangan. Bagi sebagian warga masyarakat yang berpenghasilan harian dan bekerja di sektor informal, kebijakan tersebut menjadi bencana lanjutan dari pandemi Covid-19. Dalam konteks ini berbagai wacana diproduksi berdasarkan pengetahuan oleh para ahli medis bahwasanya penularan Covid-19 bisa melalui beragam media, baik melalui benda-benda ataupun perpindahan melalui cipratan air liur yang bisa ditransfer ketika terjadi kontak atau interaksi secara langsung orang per orang. Pengetahuan tersebut menjadi salah satu dasar pembentukan wacana tentang *social* atau *physical distancing* yang berimplikasi pada lahirnya aktivitas kerja di rumah, belajar, dan berdoa di rumah.

Seiring dengan makin bertambahnya jumlah warga yang terinfeksi Covid-19, kinerja pemerintah semakin dituntut untuk lebih serius dalam pencegahan penyebaran. Situasi ini mendorong lahirnya kebijakan PSBB, selama tahun 2020, sebagai penerjemahan pentingnya melakukan karantina wilayah dalam menghadang penyebaran Covid-19. Indonesia tidak menerapkan kebijakan *lockdown*, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh beberapa negara lain. Wacana PSBB diangkat ke level yang lebih tinggi penerapannya diiringi oleh beberapa tindakan yang mesti dipatuhi oleh warga masyarakat. Pengaturannya tidak hanya menyangkut pentingnya tetap di rumah, namun juga mengatur tentang teknis terkait mekanisme beraktivitas di luar rumah semisal pengaturan jarak antar penumpang di dalam mobil, atau tidak diperbolehkannya pergi berdua-an atau berboncengan menggunakan sepeda motor kecuali memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) beralamat sama, dan larangan melakukan aktivitas yang melibatkan banyak orang (berkerumun). Lebih dari itu ada sanksi tegas terkait pelanggaran yang dilakukan.

Di tengah pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadhan, sejak tahun 2020, pemerintah mengeluarkan larangan pelaksanaan kegiatan ibadah di masjid seperti Shalat Tarawih, Shalat Jumat dan ibadah-ibadah lainnya. Kebijakan ini berlanjut dengan larangan mudik bagi para warga menjelang lebaran tiba. Dalam hal ini wacana terus diproduksi, direproduksi, direvisi menyesuaikan situasi penyebaran pandemi Covid-19. Meski demikian apakah berbagai kebijakan tersebut mendorong warga masyarakat itu patuh, tertib, dan mau melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut secara disiplin? Tampaknya harapan para pengagas wacana tersebut tidak disambut baik pada level praktis oleh sebagian masyarakat. Fenomena mondar-mandir sosial di jalanan dan kerumunan orang-orang di banyak ruang sosial masih banyak ditemukan saat implementasi PSBB. Pada gilirannya,

pendisiplinan tubuh untuk mengikuti berbagai anjuran kebijakan disandarkan pada bagaimana warga menerjemahkan, melembagakan wacana tersebut ke dalam tindakan individual. Harapan pemerintah supaya warga membangun kedisiplinan protokol kesehatan dan melaksanakan aturan belum menemui kesuksesan pada tingkat tertentu.

## **4. Diskusi Hasil Penelitian**

### *4.1. Produksi Wacana*

Realitas dapat dibentuk dan diproduksi melalui berbagai wacana yang saling mendukung (Priyanto, 2017). Foucault mengemukakan pengertian wacana sebagai pengetahuan yang terstruktur terkait dengan aturan dan praktik yang menghasilkan pernyataan bermakna pada satu rentang waktu tertentu. Oleh karena itu, wacana erat hubungannya dengan kekuasaan (Susanto, Tanpa Tahun). Wacana-wacana yang diproduksi tersebut menjadi sebuah pengetahuan umum yang dinikmati oleh publik. Bangunan wacana tersebut membatasi perspektif kita tentang sesuatu, sehingga pengetahuan umum yang saling melengkapi didiseminasikan dalam berbagai aspek pengetahuan yang saling melengkapi dapat menggambarkan realitas yang diterima oleh publik.

Struktur diskursif menentukan pandangan kita tentang suatu objek tertentu dalam batasan-batasan tertentu. Batasan bidang wacana dapat menentukan pandangan kita terkait realitas sesuatu. Kita menerima realitas yang dibentuk oleh struktur wacana melalui serangkaian perspektif. Definisi mengenai suatu objek diterjemahkan dibatasi oleh suatu praktik wacana (Eriyanto, 2003). Misalkan wacana terkait iklan memberikan perspektif tertentu pada sebuah objek (produk). Pembaca diarahkan kepada wacana tertentu yang telah ditentukan oleh pembuat iklannya. Akhirnya pandangan kita mengenai sebuah produk menimbulkan realitas yang hinggap ke dalam pikiran kita. Struktur diskursif pada sebuah wacana iklan tidaklah memberikan semua informasi tentang sebuah produk secara menyeluruh. Pembatasan tersebut memiliki tujuan untuk mengarahkan cara pandang pembaca sehingga memformulasikan suatu realitas tertentu dalam pikiran yang mengarahkan pembaca untuk tertarik dan mengkonsumsi produk tersebut (Priyanto, 2017).

Semakin individu merasa bebas sebenarnya individu tersebut semakin masuk dalam kontrol wacana kekuasaan. Dalam konteks kenegaraan, wacana dapat digunakan untuk mengatur, mengarahkan, dan mengkondisikan sebuah negara sesuai dengan tujuan tertentu. Pada masa Orde Baru, kekuasaan memegang peranan penting dalam pembentukan wacana. Wacana tentang pembangunan dan peningkatan gizi menjadi wacana yang disebarluaskan

lewat berbagai instansi pemerintahan dan media. Struktur wacana tersebut dibangun dan dibentuk lewat bangunan wacana yang kokoh. Di sisi lain, pengetahuan menyeluruh tentang sistem pemerintahan Orde Baru menjadi terpinggirkan (Maring, 2010).

Produksi wacana atau penyebaran formasi diskursif dalam kerangka pembentukan rezim kuasa kebenaran tidak dapat lepas dan tidak bisa bebas dari limitasi, seleksi, dan kontrol (pengendalian) dari sekian banyak formasi yang non-diskursif. Poin pentingnya adalah bahwa diskursus itu berbahaya dan kekuasaan berusaha mengendalikannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Foucault sendiri bahwa ada empat ranah ketika diskursus dianggap membahayakan, yaitu: politik (kekuasaan), seksualitas (hasrat), kegilaan, dan secara umum apa yang dianggap benar atau palsu (Umanailo, 2019).

#### *4.2. Pengetahuan dan Kekuasaan*

Michel Foucault merupakan seorang filsuf berkebangsaan Perancis, lahir pada tahun 1926 di Poitiers. Pemikiran Foucault sangat dipengaruhi oleh Nietzsche, sebagaimana hal tersebut tampak pada karya-karyanya. Konsep tentang kekuasaan inilah yang selanjutnya menjadi fokus pemikiran Foucault. Pengetahuan dalam arkeologinya itu sendiri menurut Foucault terkait dengan segala yang bisa diucapkan oleh seseorang dalam suatu praktik diskursif dan tidak bisa dispesifikasikan oleh kenyataan tersebut. Ia merupakan satu ruang yang mana subyek dapat menempati satu posisi dan berbicara mengenai obyek-obyek yang dikenalnya dalam diskursus. Ia pun merupakan wilayah koordinasi dan subordinasi pernyataan-pernyataan di mana konsep tampak, didefinisikan, diaplikasikan, dan ditransformasikan. Pengetahuan sangat ditentukan oleh kemungkinan pemakaian dan penyesuaian yang diberikan oleh diskursus. Dalam konteks tersebut terdapat bangunan-bangunan pengetahuan yang tidak terikat dengan sains, tetapi tidak ada pengetahuan yang tidak mempunyai praktik-praktik diskursif partikular, dan praktik diskursif apapun dapat didefinisikan oleh pengetahuan yang dibentuknya (Umanailo, 2019).

Sementara kekuasaan dalam perspektif Foucault berbeda dengan konsep kekuasaan pada umumnya baik konsep kekuasaannya Marxian maupun Weberian. Bagi Foucault kekuasaan bukanlah kepunyaan para raja, penguasa atau pemerintah. Tidak terkoneksi dengan kepemilikan, sebagai properti, perolehan, atau hak istimewa yang pegang oleh sekelompok masyarakat dan yang kapan saja bisa hilang (Kamahi, 2017). Kekuasaan menurut Foucault bukanlah cerminan dari kelas borjuis maupun elit penguasa beserta atributnya, tetapi ia merupakan strategi yang diakibatkan oleh fungsi (disposisi, manuver,

taktik, dan teknik). Kekuasaan pun bukanlah berasal dari ekonomi ataupun politik karena memang tidak ada dasarnya, kekuasaan hadir sebagai jaringan kompleks yang tidak terbatas dari kekuasaan mikro yang ada pada setiap aspek sosial (Wijaya, 2012).

Foucault menekankan bahwa kekuasaan tidak beroperasi secara negatif melalui tindakan represif, koersif, dan menekan dari sekelompok pemilik kekuasaan, termasuk negara. Kekuasaan tidak hadir sebagai dominasi dari suatu kelas yang memiliki penguasaan atas ekonomi atau manipulasi ideologi (Marx), dan bukan pula dimiliki atas suatu kharisma (Weber). Dalam hal ini kekuasaan tidak dipahami secara negatif, melainkan positif dan produktif. Kekuasaan tidak dilihat sebagai institusi atau struktur, dan bukan kekuatan yang dimiliki, tetapi kekuasaan merupakan istilah yang dipakai untuk menyebut situasi strategis kompleks dalam masyarakat. Kekuasaan menurut Foucault mesti dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan, yang mempunyai ruang lingkup strategis (Kamahi, 2017).

Perspektif Foucault tentang kekuasaan pun terlihat dari pemaknaannya mengenai kekuasaan sebagai situasi strategis yang senantiasa berada dalam hubungan-hubungan kekuasaan. Hubungan-hubungan tersebut bisa ditentukan oleh perbedaan ekonomi, politik, dan bahasa. Akhirnya dinamika hubungan kekuasaan tersebut mengubah, memperkuat, atau membalikkan hubungan-hubungan tersebut melalui perjuangan dan pertarungan terus menerus. Dalam titik tertentu ragam hubungan kekuasaan tersebut dapat mendorong lahirnya bentuk-bentuk konflik dalam berbagai institusi sosial dan pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menjelaskan bahwa hubungan-hubungan kekuasaan itu tidak terlepas dari konflik yang melibatkan berbagai pihak. Kerangka pemikiran Foucault tentang kekuasaan menyediakan pemahaman bahwa kekuasaan itu sendiri tidak lepas dari konflik dan perlawanan sebagaimana yang ditegaskan oleh Foucault bahwa untuk memahami tentang kekuasaan yang pertama harus dipahami adalah adanya beragam hubungan-hubungan kekuasaan yang melekat pada bidang organisasi dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya (Maring, 2010).

Kekuasaan dijalankan dengan serangkaian peraturan tertentu yang saling mempengaruhi. Kekuasaan menempati posisi-posisi strategis yang berkaitan satu sama lain. Kekuasaan tidak berasal dari luar tetapi dari dalam. Ia menjalankan perannya melalui serangkaian aturan-aturan dan sistem-sistem tertentu sehingga menghasilkan semacam rantai kekuasaan. Lebih jauh lagi Foucault menjelaskan hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Menurutnya, kekuasaan dan pengetahuan memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Kekuasaan memproduksi pengetahuan, dan pengetahuan

menyediakan, jadi tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan dan tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan (Maring, 2010; Priyanto, 2017).

Kekuasaan dideskripsikan oleh Foucault bukan sebagai alat untuk menguasai orang-orang secara fisik dan kediktatoran. Kekuasaan dalam masa modern mengalami pola normalisasi yang mana kekuasaan disamarkan, disembunyikan dan diselubungi sehingga terkesan tidak tampak. Kekuasaan tidak lagi bekerja melalui penindasan dan kekuatan fisik. Ia dijalankan dengan membuat regulasi-regulasi yang dijalankan dan ditaati secara sukarela dalam sebuah organisasi, instansi maupun negara (Barthen, 2001).

Lebih lanjut Foucault (1980 dalam Maring, 2010), melihat kekuasaan berhubungan dengan strategi yang dijalankan pihak tertentu yang bertujuan untuk mendorong pihak lain untuk patuh atau taat, mendorong pihak lain tunduk, atau membuat pihak lain memberi dukungan terhadap pihak tertentu tersebut. Penekanan kekuasaan berdasarkan perspektif Foucault:

1. Kekuasaan itu selalu ada dalam relasi. Kekuasaan dalam realitasnya berarti sejumlah hubungan yang bersifat teratur, hirarkis, dan dikoordinasikan. Dengan melihat kekuasaan yang selalu ada dalam hubungan-hubungan yang bersifat teratur dan dikoordinasikan maka masalah yang harus dilakukan adalah menyediakan jalinan analisis yang dapat mengungkapkan bagaimana kekuasaan itu bekerja, bukan mengangkat teori kekuasaan. Tekanannya adalah pada beragamnya relasi kekuasaan.
2. Relasi kekuasaan selalu terlihat dalam struktur tindakan yang mendorong pihak lain melalui rangsangan, persuasi, atau bisa juga melalui paksaan dan larangan. Dalam hal ini analisis kekuasaan Foucault memberi perhatian terhadap strategi dan mekanisme untuk merealisasikan tujuan.
3. Kekuasaan itu bekerja pada berbagai tingkatan, tidak terpusat, dan tersebar di mana-mana baik pada individu, organisasi atau institusi. Ia diproduksi dan direproduksi terus menerus. Kekuasaan tidak selalu dilihat sebagai hubungan antara kekuasaan dan negara, atau yang datang dari satu arah, atau selalu datang dari atas ke bawah. Dengan demikian syarat-syarat kemungkinan pemahaman kekuasaan tidak terpusat pada satu sumber. Namun pada tingkat tertentu (mikro) ketika hubungan kekuasaan tidak sebanding maka ada arah kekuasaan yang datang dari atas atau dari pihak yang merasa lebih kuat atau mempunyai pengaruh.

Foucault sendiri tidak serta merta menolak konsep otoritas sebagai salah satu sumber kekuasaan yang ada dan dipraktikkan oleh pihak tertentu. Namun Foucault mengkritik kelemahan analisis kekuasaan yang hanya memandang otoritas sebagai satu-satunya sumber

kekuasaan yang beroperasi. Bila otoritas dipandang sebagai satu-satunya sumber kekuasaan yang beroperasi maka gerakan-gerakan dalam arah yang berlawanan tidak dapat diketahui atau ditelusuri. Meski kecil arah gerakannya, tetapi hal tersebut merupakan strategi yang terkoordinasi dan merupakan hubungan-hubungan atau relasi kekuasaan yang dapat menghasilkan dampak-dampak baru dan dapat berkembang lebih lanjut (Foucault, 1980 dalam Maring, 2010).

Foucault pun memandang pengetahuan sebagai wacana yang beroperasi dalam jaringan kekuasaan. Kekuasaan tersebut tidak muncul namun bekerja dalam sistem organisasi itu sendiri. Pengetahuan tidak bersifat netral, tetapi pengetahuan itu bersifat politis. Melalui pengetahuan kegiatan dan kehidupan diatur dengan aturan-aturan tertentu. Pengetahuan berfungsi sebagai kontrol sosial. Masyarakat juga dapat membentuk bangunan pengetahuan untuk mengatur bagaimana seharusnya warganya bertindak dan bertingkah laku atau membatasi hal-hal tertentu. Pengetahuan tersebut bisa diwujudkan dengan cerita, konsep kepercayaan dan sebagainya (Maring, 2010).

Praktik pendisiplinan dapat dilakukan dengan kontrol pengetahuan atau wacana. Praktik tersebut dalam masyarakat modern tidak harus melalui cara fisik. Sistem regulasi seperti jadwal, peraturan, prosedur kegiatan, pelaksanaan, *punish and reward* (hukuman dan penghargaan) dapat menjadi kontrol tanpa disadari oleh individu-individu dalam sistem tersebut. Foucault lebih menekankan mekanisme kekuasaan tentang pendisiplinan dan kepatuhan yang mampu bekerja mempengaruhi bagian terdalam dari individu, menyentuh tubuh mereka, merasuk ke dalam tindakan, tingkah laku, wacana, proses belajar, dan dalam kehidupan sehari-hari (Foucault, 2002; Maring, 2010). Penggambaran tentang pendisiplinan tubuh dan hukuman sebagai metafora kekuasaan dengan melihat bagaimana pendisiplinan dan hukuman itu bekerja di penjara. Sebagai mana yang disinggung oleh Frank (1998).

*In the great work Discipline and punish, Foucault's central metaphor for power was the panopticon - a prison design that allowed an unseen guard to exercise perpetual surveillance of each cell. In the architecture of the panopticon Foucault began to appreciate how power operates through those micro-strategies that turn the self, here a prisoner, into its own agent of disciplinary practices.*

Sebagai mana Foucault menulis tentang *panopticon* (penjara).

*He who is subjected to a field of visibility, and who knows it, assumes bility for the constraints of power; he makes them play spontaneously himself, he inscribes in himself the power relation in which he plays both roles; he becomes the principle of his own subjection (Frank, 1988).*

Foucault berpikiran bahwa konsep kekuasaan telah berubah dibandingkan dengan abad ke-19 dengan ciri kekuasaan pada saat itu cenderung brutal, dioperasikan secara kontinyu, menekankan aspek ketaatan pada tata cara tertentu dan penuh dengan simbolisme dan kekuasaan itu berada di ruang publik (Susanto, Tanpa Tahun). Kekuasaan ada di mana-mana dan bukan milik siapa-siapa, kekuasaan itu merupakan strategi. Kekuasaan terjadi sebagai praktik dalam suatu ruang lingkup tertentu, terdapat banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu sama lain dan cenderung senantiasa mengalami pergeseran. Kekuasaan menentukan susunan, aturan, dan hubungan dari dalam. Kekuasaan berkaitan erat dengan pengetahuan yang berasal dari relasi-relasi kekuasaan yang menandai subjek. Foucault menautkan kekuasaan dengan pengetahuan sehingga kekuasaan memproduksi pengetahuan dan pengetahuan menyediakan kekuasaan. Ia mengatakan bahwa kekuasaan bekerja melalui normalisasi dan regulasi dan ia tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi (Aur, 2005). Lebih lanjut Hannigan (2006) dalam *Environmental Sociology, Second Edition*, memberikan penjelasan terkait perbedaan konseptual konsep kekuasaan Foucault dengan konsep dominasi Marxian (Mudhoffir, 2011). Menurutnya:

*... power may be everywhere but relationship of power are rarely asymmetrical and wholly democratic. Foucault makes an important distinction between power and domination. The latter refers to asymmetrical relationships of power in which the subordinated party has a negligible chance of exercising his or her will. Whereas power relationships are often unstable and reversible, domination means that these relationships are less fluid and less negotiation.*

Dari hal di atas kita peroleh gambaran bahwa ada dua hal penting yang harus diperhatikan ketika melihat bagaimana kekuasaan itu bekerja melalui mekanisme relasi kekuasaan atau relasi dominasi. Mudhoffir (2011), memposisikan relasi kekuasaan (*governmentality*) sebagai praktik kekuasaan yang potensial dalam diri subjek sehingga memiliki kapasitas pengendalian diri yang membentuk dan menghasilkan terbukanya kemungkinan pilihan tindakan subjek, maka cara-cara kekerasan dan konsensual pun

berlangsung. Penggunaan kekerasan dan model konsensual telah direformulasi menjadi elemen pengendalian antar individu dalam relasi sosial.

Relasi kekuasaan (*governmentality*) menciptakan situasi di mana individu merasa bebas, ia tidak merasa terpaksa atau beranggapan bahwa tidak ada alternatif tindakan kecuali yang telah ditentukan oleh kelompok dominan, melainkan dalam diri subjek terdapat kontrol diri atas praktik hidupnya sesuai dengan kontrol sosial yang dikehendaki oleh kepentingan politik-ekonomi negara. Istilah *Goverementality* yang digunakan Foucault (1982) biasa juga disebut juga sebagai *conduct of conduct*, yakni suatu relasi kekuasaan yang di dalamnya terdapat pengandaian hadirnya kebebasan tetapi sekaligus mengarahkan. Ini artinya model relasi kekuasaan (*govermentality*) ini bersifat mengatur, membentuk, dan mengkonstruksi pilihan tindakan tertentu dari tindakan yang lain. Lebih jauh Foucault menganggap bahwa relasi kekuasaan kini makin dipengaruhi dan terus-menerus berada di bawah kontrol negara. Itulah sebabnya mengapa Foucault mengistilahkan model relasi kekuasaan ini sebagai *governmentality* karena relasi kekuasaan makin digovermentalisasi (*governmentalized*).

Sedangkan relasi dominasi Foucault (1982) mengandaikan ia sebagai bentuk dari relasi kekuasaan yang stabil, hirarkis, tetap, dan sulit untuk dipertahankan. Ia hadir dalam situasi di mana relasi antar-subjek tidak berlangsung secara sejajar atau seimbang. Ia merupakan bentuk relasi kekuasaan yang asimetris di mana subjek yang didominasi memiliki keterbatasan ruang untuk bermanuver atau dalam menentukan pilihan suatu tindakan (Mudhoffir, 2011). Dalam relasi dominasi subjek subordinat tidak memiliki pilihan lain selain yang dikehendaki kelompok dominan, ini artinya pilihan yang diambil subjek sangat terbatas.

Terdapat satu model relasi kekuasaan lainnya dalam melihat perbedaan antara kekuasaan dengan dominasi, yakni relasi kekuasaan sebagai *strategic games between liberties*. Bekerjanya kekuasaan dalam model ini dapat dilihat dalam bentuk manipulasi ideologi, penyampaian argumentasi yang rasional, atau eksploitasi ekonomi. Namun kekuasaan dalam model ini tidak berarti bahwa ia bertentangan dengan kepentingan subjek yang lain dari relasi kekuasaan itu. Relasi kekuasaan model ini dapat kita lihat pada upaya-upaya pemberdayaan atau upaya pemaksaan terhadap subjek tertentu supaya mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan (Foucault, 1982 dalam Mudhoffir, 2011). Dengan demikian terdapat tiga level analisis kekuasaan, yaitu yang dipahami sebagai relasi strategi, *governmentality*, dan dominasi (yang biasanya disebut sebagai kekuasaan).

#### 4.3. *Fenomena Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Wacana, Pengetahuan dan Kekuasaan Foucault*

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama menghadapi pandemi Covid-19 terlihat berubah-ubah bergantung pada daya sebar pandemi di masyarakat. Masyarakat dibingkai dalam berbagai anjuran untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat, mobilitas dibatasi, aktivitas di luar rumah dikurangi seperti bekerja, sekolah, dan beribadah di rumah, sampai pada tahap pemberlakuan *new normal* atau AKB.

Setelah setahun berselang, kehadiran pandemi Covid-19 di tengah-tengah masyarakat terkesan sudah dianggap “biasa” terlihat banyaknya masyarakat yang kemudian longgar dalam menerapkan protokol kesehatan, terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengundang kerumunan dan aktivitas-aktivitas lainnya yang pada saat awal terjadi pandemi Covid-19 itu dilarang. Dalam konteks ini terlihat bagaimana kekuasaan itu bekerja. Seperti pandangan Foucault kekuasaan itu bukan menyangkut kepemilikan sumber daya (kuasa) atau yang secara kewenangan memiliki seperangkat aturan hukum yang menyertainya. Kekuasaan terealisasikan dalam ruang interaksi antar berbagai elemen yang hidup dalam ruang kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini ada sebagian warga yang dengan disiplin menjalankan kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, di sisi lain ada juga warga masyarakat yang resisten terhadap aturan-aturan tersebut.

Untuk itu penting kiranya melihat konteks bagaimana wacana, pengetahuan yang dibangun, melahirkan pendisiplinan tubuh sebagai wujud kepatuhan warga sebagai respon positif dari masyarakat. Respon tersebut terlihat melalui proses negosiasi di ruang interaksi antar elemen baik dari sumber yang melahirkan wacana yang menginginkan kepatuhan maupun dengan elemen masyarakat yang menafsirkan wacana dan pengetahuan tersebut kemudian akan bersikap memilih bergantung kepada kepentingannya. Atas dasar kondisi tersebut, pemerintah selalu mereproduksi disertai sosialisasi dan pelembagaan wacana dan pengetahuan agar menjadi pijakan dalam bertindak di tengah pandemi Covid-19. Pada situasi ini, sentra produksi wacana dari pemerintah pusat mengalami pemekaran dan penafsiran oleh tiap-tiap pemerintah daerah yang mana aturan yang dikeluarkan oleh kementerian pun beragam.

Kurangnya koordinasi yang sinergis antar elemen pemerintahan dan ketidakkonsistenan peraturan berimplikasi pada sikap mendua di kalangan masyarakat, yaitu antara berdisiplin menjalankan segala aturan dari pemerintah dengan sikap melanggar semua aturan. Sehingga tidak heran lahirnya wacana-wacana dari pemerintah, sebagai

pengetahuan dari aturan, bersifat multi tafsir atau “suka-suka” tergantung kemauan, tujuan atau kepentingan yang menyertainya dan saling mempertentangkan (dualisme) dan tidak saling melengkapi (dualitas). Asumsi umum meyakini bahwa faktor ekonomi yang melandasi sikap warga tidak patuh aturan untuk “tetap di rumah”, mereka masih tetap berkeliaran “di jalanan”. Pernyataan itu tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar. Realitas warga yang masih banyak melakukan aktivitas di luar rumah baik mencari nafkah atau hanya sekedar jalan-jalan atau berkunjung ke teman atau kerabat memperlihatkan faktor selain ekonomi. Bisa jadi pula sikap warga yang demikian merupakan cerminan dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak saling terkoordinasi. Lalu di mana letak kepatuhan dari warga sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan-kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di awal?

Lahirnya sikap yang ambigu dari masyarakat dan pemerintah diaktualisasikan dalam ruang relasi yang interaktif. Hal ini sejalan dengan pengertian kekuasaan itu lebih memuat strategi-strategi yang dikembangkan oleh berbagai elemen sebagai satuan sosial dalam ruang hidup yang nyata ketika mereka menerjemahkan dan mengaktualisasikan dari beragam wacana dan pengetahuan tentang Covid-19 sesuai dengan irama hubungan sosial itu sendiri. Di sini terlihat bagaimana Foucault melihat kekuasaan berdimensi operasional, bagaimana kekuasaan itu bekerja, yang bersifat subyektif hidup dalam ruang relasi sosial.

Proses pendisiplinan tubuh melalui serangkaian tindak nyata terkait operasional medis secara individual dan komunal melalui beragam aksi seperti yang kita dengar, lihat dan konsumsi melalui beragam media dalam satu sisi justru tidak melahirkan kepatuhan tubuh itu sendiri sebagai bagian dari pencegahan penyebaran Covid-19. Wacana awal sifat dasar Covid-19 yang secara alamiah terkait dengan masalah kesehatan kemudian pembahasannya berkembang melalui beragam aspek yang menyertainya baik aspek sosial, politik, budaya maupun ekonomi. Beragam kalangan baik dari pejabat pemerintah, praktisi sosial ekonomi, akademisi, budayawan, tenaga medis dan lain-lain banyak yang melakukan pembahasan pandemi Covid-19 dari berbagai sudut pandang. Di tengah situasi *Work from Home* (WFH) pembahasannya dilakukan secara daring melalui berbagai aplikasi yang tersedia di internet dengan tujuan yang hampir sama yaitu melawan Covid-19 dengan berbagai cara termasuk bagaimana cara mengatasi dampak sosial ekonomi budaya yang ditimbulkan.

Kehadiran pandemi Covid-19 di satu sisi telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat global saat ini. Nilai-nilai sosial budaya telah mengalami transformasi yang demikian cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Pandemi Covid-19 telah memaksa

warga dunia mereformasi tatanan nilai sosial budaya supaya bisa mengakomodasi berbagai kebutuhan hidup masyarakat di tengah merebaknya pandemi Covid-19. Setidaknya situasi ini telah mendorong masyarakat untuk memiliki kesadaran tinggi tentang pentingnya hidup sehat dan kepedulian terhadap sesama, meski kepedulian ini diaktualisasikan dengan bentuk yang berbeda dengan sebelumnya. Peduli sesama diterjemahkan dengan tidak melakukan kontak fisik, kebiasaan silaturahmi tidak lagi dilakukan secara langsung melalui kehadiran fisik di satu tempat yang sama. Justru rasa peduli itu dilakukan dengan cara menjauhinya dulu. Tentunya perlu usaha yang kuat untuk membalikan situasi yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya.

Satu narasi sosial yang menguat adalah kepedulian, untuk berbagi dengan pihak yang terdampak cukup serius, menjadi nilai penting yang menjadi kesadaran komunal. Sehingga pemberlakuan PSBB, *lockdown* (karantina wilayah) perlu didukung adanya jaminan sosial yang kuat yang dianggap sebagai salah satu strategi dalam melahirkan kepatuhan masyarakat, meski pada tataran praktis kesadaran pemberian bantuan dalam membangun situasi jaminan sosial yang kuat tidak berjalan dengan cepat, masih banyak kendala-kendala tertentu. Sebagian masyarakat menganggap pemerintah yang mesti hadir di depan untuk mengatasi dampak nyata yang ditimbulkan pandemi Covid-19. Ketika bantuan itu dianggap “telat” karena masih banyak warga masyarakat yang terdampak langsung yang masih belum memperoleh bantuan, kewibawaan pemerintah dipertaruhkan.

Ketika wacana-wacana tentang pentingnya untuk tetap di rumah, bekerja dan melakukan berbagai aktivitas di rumah terus dikampanyekan di berbagai ruang pemberitaan, di ruang nyata masyarakat menganggap hal tersebut hanyalah wacana-wacana yang minim substansi. Pada gilirannya, sebagian masyarakat masih berkerumun dan masih tidak mengindahkan protokol-protokol kesehatan. Cara pandang yang berbeda melahirkan strategi penerjemahan pengertian kekuasaan dalam ruang nyata yang tidak tersangkut dengan pengertian kekuasaan yang terkait dengan kepemilikan sumber daya kekuasaan itu sendiri. Pengetahuan terkait pandemi Covid-19 yang lahir pun menjadi beragam dengan cara-cara penerjemahan yang bersifat individual.

Situasi penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia berkembang seiring dengan munculnya permasalahan-permasalahan baru yang harus ditangani secara serius. Pemerintah menerapkan kebijakan *New Normal*, AKB, sebagai bentuk adaptasi masyarakat supaya dapat hidup di tengah-tengah ancaman pandemi Covid-19 dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan.

Pemberlakuan kebijakan baru dengan menerapkan skenario *New Normal*, AKB, di tengah-tengah masyarakat akan melewati proses pemaknaan dan tindakan yang beragam dari berbagai pihak. Tujuan dari pemerintah adalah kepatuhan dari masyarakat tanpa kecuali terhadap protokol-protokol hidup sehat yang disosialisasi sebagai wacana dan pengetahuan yang diproduksi dan direproduksi. Dengan kacamata Foucault, meski tujuan kekuasaan dalam hal tertentu adalah untuk melahirkan kepatuhan dari pihak masyarakat secara menyeluruh, tetapi sebagai kekuasaan yang beroperasi di ruang relasi maka terlihat adanya pertentangan-pertentangan tertentu yang dipraktikkan oleh pihak-pihak lain.

Sebelum skenario *New Normal*, AKB, diberlakukan tindakan masyarakat sudah memperlihatkan pertentangan-pertentangan atau resistensi terhadap kebijakan-kebijakan sebelumnya (PSBB). Normalisasi yang diharapkan melahirkan kepatuhan nantinya perlu dinegosiasikan di ruang publik dengan penekanan aksi yang lebih relevan dan riil dengan mengingat seberapa siapkah semua aktor masyarakat menerima dan bernegosiasi di ruang publik sebagai ranah dialog yang nyata melalui tindakan yang terwujudkan.

Tindak penanggulangan dari pemerintah yang dianggap memiliki seperangkat pengetahuan sebagai sumber tindak kebijakan dalam aktualisasi kekuasaan yang ditransmikan ke pihak lain (warga masyarakat), terlebih dulu akan mengalami resistensi dari pihak lain di ruang publik. Meskipun, dasar pembenaran tindakan pemerintah didasari pengetahuan yang spekulatif. Di sinilah jalin berkelindannya interaksi kekuasaan antar aktor atau elemen sosial yang merasa memiliki pengetahuan berbasis wacana yang terus mengalami produksi dan reproduksi terlepas dari benar ataukah tidak landasan pengetahuan tersebut. Terlebih situasi mobilitas informasi tanpa batas melalui jejaring media sosial berbasis internet menambah makin banyak pengetahuan yang diadopsi dan dijadikan landasan tindakan terlepas berita tersebut hoaks atau bukan.

Pada tataran tertentu, kebijakan pemerintah pusat tidak dengan sendirinya mendapat respon yang searah dari pemerintah daerah sehubungan dengan adanya cara pandang dalam melihat realitas yang nampak. Cara pandang terhadap situasi yang dihadapi berangkat dari kepentingan yang menjadi pengikat dan tujuan yang ingin dicapai. Tentunya hal ini mengindikasikan kurangnya koordinasi secara sinergis di antara aktor di pemerintahan. Hal ini berimplikasi pada kegamangan dan kebingungan di masyarakat sehingga bertindak di luar harapan pemerintah melalui berbagai kebijakannya. Dengan menggunakan cara pandang Foucault ini, dapat dilihat bagaimana mekanisme kekuasaan itu bekerja tanpa harus terikat secara ketat kepada sumber kekuasaan yang bagi sebagian kalangan dianggap sebagai kepemilikan (pendekatan kekuasaannya Marxian dan Weberian). Realitanya

fenomena pandemi Covid-19 telah banyak mengubah tatanan nilai dan tindak masyarakat bersifat multidimensi yang bisa ditelisik melalui perspektif kekuasaan.

Beranjak dari paparan di atas maka ruang analisis kekuasaan dalam melihat tindak subjektif masyarakat (subjek) dalam menyikapi hadirnya pandemi Covid-19 terangkai dalam tiga model analisis kekuasaan yaitu relasi strategi, relasi kekuasaan (*governmentality*), dan relasi dominasi yang mana dalam menjalankan kekuasaan negara melalui perangkat institusi (*apparatus*) hadir sebagai pihak yang berhadapan dengan masyarakat dalam derajat yang berbeda. Kekuasaan sebagai relasi strategi negara hadir memproduksi wacana, internalisasi pengetahuan yang dilakukan secara terus menerus mendorong kesadaran (masyarakat) atau “memaksa” subjek (masyarakat) dengan kebebasan dalam mengambil keputusan tindakannya sendiri.

Dalam model *governmentality* subjek (masyarakat) memiliki kebebasan atau memiliki kemungkinan banyaknya pilihan tindakan, meski dalam tataran tertentu subjek (masyarakat) diarahkan untuk mengambil tindakan yang dikehendaki negara (tetap disiplin dalam menjalankan protokol medis, dan sesuai kebijakan yang terkait penanggulangan pandemi Covid-19 ini). Dalam model ini berarti pilihan tindakan tertentu dibentuk, diatur, dan dikonstruksi sesuai dengan situasi riil wabah pandemi Covid-19 ini yang makin merajalela. Meskipun berlaku *New Normal* atau AKB, yang mana fasilitas-fasilitas publik, tempat-tempat bekerja telah kembali dibuka, pilihan tindakan subjek (masyarakat) diatur, dikonstruksi dengan harapan kebebasan yang dimiliki subjek (masyarakat) tetap sejalan dengan kebijakan negara.

Menurut Mudhoffir (2011) penggunaan aparatus *governmentality* dalam mengendalikan tubuh sosial pun memanfaatkan fungsi wacana dan produksi pengetahuan, meski bentuk pengetahuannya tidak diproduksi melalui definisi ilmiah dan klaim kebenaran, tetapi berdasarkan kepentingan politik-ekonomi. Itu juga mungkin yang mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan *New Normal*, AKB, di tengah situasi jumlah yang terapar Covid-19 justru meningkat. Melemahnya sektor produktif ekonomi masyarakat akibat kebijakan PSBB menjadi salah satu faktor pendorong pemberlakuan kebijakan *New Normal*—AKB.

Kekuasaan sebagai relasi dominasi cenderung memosisikan subjek (masyarakat) sebagai pihak yang terdominasi pihak lain, dalam hal ini negara, yang mana subjek tidak banyak memiliki banyak pilihan tindakan tertentu. Mudhoffir (2011) menggambarkan bahwa relasi kekuasaan ini bekerja dengan memanfaatkan fungsi wacana sebagai rezim kebenaran, dan menggunakan apparatus disiplin dalam normalisasi praktik sosial subjek.

Bentuk pendisiplinan tubuh subjek (masyarakat) merupakan relasi dominasi. Dalam konteks ini terdapat aktor dominan yang terus memproduksi wacana menjadi pengetahuan yang valid atau *legitimate* dalam menjelaskan realitas, kemudian pengetahuan tersebut diinternalisasikan oleh individu supaya bersikap sesuai dengan kehendak aktor dominan tersebut. Kepentingan aktor dominan menjadi rasionalitas atas tubuh yang disiplin. Praktik pendisiplinan dioperasikan sebagai aparatus kekuasaan terhadap tubuh individu sebagai sasarannya. Wacana-wacana tentang pandemi Covid-19 yang diproduksi oleh lembaga-lembaga yang dianggap kompeten sebagai aparatus negara (aktor dominan) menjadi pengetahuan yang dianggap *valid* atau *legitimate* dan menjadi dasar pendisiplinan tubuh individu dalam berperilaku di tengah realitas sosialnya. Individu atau masyarakat yang ter subordinasi tidak memiliki dasar pengetahuan mumpuni tentang Covid-19 tunduk dan melakukan serangkaian protokol medis sesuai dengan imbauan kebijakan pemerintah terkait penanggulangan Covid-19 ini. Dalam praktiknya aparatus negara berwenang melakukan tindakan paksa bagi warga yang tidak disiplin menerapkan protokol medis ini.

## 5. Kesimpulan

Fenomena pandemi Covid-19 menjadi “momok” yang menggelisahkan masyarakat global. Berbagai upaya yang dianggap strategis dipraktikkan dan dijadikan kebijakan oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi penyebaran pandemi Covid-19. Termasuk tindak kebijakan dalam menanggulangi dampak yang ditimbulkannya terhadap tatanan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak semudah membalikkan tangan dalam mempengaruhi tindak sosial masyarakat dalam pandemi Covid-19. Wacana dan pengetahuan yang ditransmisikan untuk dijadikan dasar tindak warga masyarakat sebagai wujud kepatuhan melalui pendisiplinan tubuh tidak berjalan seiring sejalan dengan maksud yang diinginkan.

Hilir mudiknya berbagai informasi dalam media digital sebagai sumber pengetahuan masyarakat terlepas benar ataukah tidak (*hoaks* atau bukan) menjadi alternatif aktual warga masyarakat dalam persepsikan dan praktik di ruang publik maupun privat. Protokol kesehatan dengan tujuan mengurangi penularan Covid-19 yang selalu disosialisasikan sebagai pengetahuan yang dianggap “benar” atau strategis tidak serta merta menjadi kebiasaan baru. Informasi benar atau *hoaks* di berbagai media baik digital maupun informasi langsung, baik dari pihak yang kompeten maupun tidak berada pada situasi yang konstestatif. Pada situasi ketidakhadiran paksaan, masyarakat memilih dan memilah sesuai

dengan kapasitas pengetahuan yang mereka peroleh. Pemerintah melalui sejumlah pembenaran berupaya keras agar kebijakan protokol kesehatan diindahkan dan dipatuhi warga masyarakat melalui pendisiplinan diri.

Selain melalui wacana pendisiplinan diri, pemerintah pusat dan daerah, memberikan jaminan sosial kepada kelompok masyarakat sebagai cara lain mendorong kepatuhan protokol kesehatan. Bantuan diberikan melalui berbagai bentuk baik pangan maupun sarana alat penjagaan diri (*masker* dan *hand sanitizer*) sebagai konsekuensi pembatasan ruang gerak fisik warga masyarakat. Walaupun sebagian kalangan memandang pemberian bantuan sosial telah menimbulkan keresahan tertentu akibat isu distribusi tidak tepat sasaran kepada warga masyarakat yang berhak menerima.

Melalui perspektif kekuasaan Foucault, kita bisa lihat bagaimana kekuasaan bekerja melalui beragam mekanisme dalam ruang interaksi yang dilihat secara horizontal. Ruang tafsir relasi kekuasaan terkait fenomena pandemi Covid-19 di Indonesia memperlihatkan adanya tiga perhatian yang berbeda yaitu relasi kekuasaan sebagai strategi, relasi kekuasaan *governmentality*, dan relasi kekuasaan dominasi. Ketiga model analisis bisa kita lihat dalam realitasnya.

Jalinan antar aktor yang berada pada jejaring kekuasaan sebagai pihak yang diposisikan terlibat menjadi perhatian utama dalam melihat situasi pandemi Covid-19. Adanya saling percaya dari tiap-tiap pihak yang berada dalam situasi ini menjadi salah satu kunci dalam menanggulangi penyebaran pandemi Covid-19 tambah meluas. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan, sebenarnya, menjadi salah satu kunci utama dari berbagai kebijakan yang tampak tumpang tindih dan tidak konsisten dari pemerintah. Oleh karenanya, produksi dan reproduksi wacana yang memungkinkan praktik atau tindak kepatuhan protokol kesehatan adalah strategi menghadapi pandemi Covid 19.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, C., G. 2020. *Catat Daerah Ini Kemungkinan Segera Terapkan 'New Normal'*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200527151309-4-161255/catat-daerah-ini-kemungkinan-segera-terapkan-new-normal>.
- Aur, A. 2005. *Pascastrukturalisme Michel Foucault dan Gerbang Menuju Dialog Antarperadaban*. Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto (ed). *Teori-Teori Kebudayaan*, (pp.145-162). Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Barthen, K. 2001. *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*. Jakarta: Gramedia.
- Dewi, R., K. 2020. *Mengenal Apa Itu PSBB, Aturan, Daerah yang Menerapkan hingga Sanksinya*. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/14/093800065/mengenal-apa-itu-psbb->

- aturan-daerah-yang-menerapkan-hingga-sanksinya?%20(14/04/2020,%2009.38%20WIB).
- Djalante, R. dkk. 2020. *Review and Analysis of Current Responses to Covid-19 in Indonesia: Period of January to March 2020*. Progress in Disaster Science, ELSEVIER. Vol 6. Diakses dari <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590061720300284>
- Eriyanto. 2003. *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: Penerbit LKis.
- Foucault, M. 1980. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972 – 1977*. Colin Gordon ed. New York: Pantheon Books.
- Foucault, M. 2002. *Power/Knowledge-Wacana: Kuasa/Pengetahuan terj.* Yudi Santosa Jogjakarta: Bentang Budaya.
- Frank, A. W. 1998. *Stories of Illness as care of The Self : A Foucauldian Dialogue*. Health, Vol. 02 No. 03. Published Sage Publications, Ltd. 329-348. Diakses dari [https://www.researchgate.net/profile/Arthur\\_Frank3/publication/239771821\\_Stories\\_of\\_Illness\\_as\\_Care\\_of\\_the\\_Self\\_A\\_Foucauldian\\_Dialogue/links/5a78e0be0f7e9b41dbd44110/Stories-of-Illness-as-Care-of-the-Self-A-Foucauldian-Dialogue.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Arthur_Frank3/publication/239771821_Stories_of_Illness_as_Care_of_the_Self_A_Foucauldian_Dialogue/links/5a78e0be0f7e9b41dbd44110/Stories-of-Illness-as-Care-of-the-Self-A-Foucauldian-Dialogue.pdf)
- Hidayat, T. 2020. *Indonesia Nomor Satu Kasus Covid di Asia Tenggara dan Kesembilan di Asia*. Diakses dari <https://akyat.com/seputartangsel.pikiran-r/nasional/pr-14574307/indonesia-nomor-satu-kasus-covid-di-asia-tenggara-dan-kesembilan-di-asia>.
- Kamahi, U. 2017. *Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik*. (Jurnal Al-Khitabah Vol 03. No. 01 Hal. 117-133). Makassar, Universitas Islam Negeri Alaudin.
- Margianto, H. 2020. *New Normal di Indonesia Apa yang Akan Terjadi?*. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/27/082007465/new-normal-di-indonesia-apa-yang-akan-terjadi?page=all>.
- Maring, P. 2010. *Bagaimana Kekuasaan Bekerja, Dibalik Konflik, Perlawanan, dan Kolaborasi?: Sebuah Sudut Pandang Antropologi Tentang Perebutan Sumberdaya Ekologi*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Antropologi Kekuasaan Indonesia
- Melfianora. 2019. *Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dengan Studi Literatur*. Diakses dari <https://osf.io/efmc2/>.
- Mudhoffir, A., M. 2011. *Governmentality dan Pemberdayaan dalam Advokasi Lingkungan: Kasus Lumpur Lapindo*. (Jurnal Sosiologi Vol. 16 No. 01 Hal. 49-75) Jakarta, LabSocio Universitas Indonesia.
- Priyanto, J. 2017. *Wacana, Kuasa dan Agama Dalam Kontestasi Pilgub Jakarta: Tinjauan Relasi Kuasa dan Pengetahuan Foucault*. (Jurnal Thaqaifiyyat Vol. 18 No. 02 Hal. 186-200) Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Safrizal, Z., dkk. 2020. *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah, Pencegahan Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Susanto, I. 2020. *Relasi Kuasa Dalam Wacana Identitas*. Diakses dari <https://staff.ui.ac.id/system/files/users/irzanti.susanto/publication/wacanaidentitas.pdf>.
- Umanailo, M.C.B. 2019. *Pemikiran Michel Foucault*. Diakses dari [https://www.researchgate.net/publication/336764837\\_PEMIKIRAN\\_MICHEL\\_FOUCAULT](https://www.researchgate.net/publication/336764837_PEMIKIRAN_MICHEL_FOUCAULT)
- Wijaya, I., N. 2012. *Relasi-Relasi Kekuasaan Di Balik Pengelolaan Industri Pariwisata Bali*. (Jurnal Humaniora Vol. 24 No. 02 Hal. 141–155). Bali, Fakultas Sastra Universitas Udayana.